



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam sub bab ini akan mendeskripsikan mengenai penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam penelitian media massa yang berhubungan dengan objektivitas berita. Beberapa penelitian tersebut terdiri dari berikut ini.

Penelitian yang berkenaan dengan objektivitas pemberitaan dalam lini media massa sudah banyak dilakukan, diantaranya seperti yang diteliti oleh Shelly Novea Sary, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2016, dengan judul penelitian “Analisis Isi Objektivitas Pemberitaan Hukuman Mati Terpidana Narkotika Tahap I Dan II Pada *Program Metro News* di Metro TV”. Penelitian yang digunakan adalah analisis isi kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif, bertujuan untuk mengetahui tingkat objektivitas pemberitaan hukuman mati terpidana narkotika tahap satu dan dua pada program *Metro News* di Metro TV. Yang menjadi kajian salah satunya adalah objektivitas berita *Metro News* yang ditinjau dari penggunaan dimensi objektivitas Westerstahl.

Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa *Metro News* dalam menyajikan berita berkaitan dengan hukuman mati terpidana narkotika tahap 1 dan tahap 2 sudah dinilai objektif. Hal tersebut bisa dipastikan karena dari jumlah sembilan indikator yang diteliti, hanya satu indikator saja yang belum memenuhi

syarat bahwa suatu berita dianggap objektif, dan indikator tersebut terjadi pada bagian keseimbangan berita (*equal access*). Namun untuk delapan indikator lainnya sudah mencukupi suatu syarat mengenai objektivitas berita.

Penelitian mengenai objektivitas media lainnya juga telah dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, bernama Arga Raka Peterson pada tahun 2016, yang berjudul “Objektivitas Pemberitaan Terkait LGBT Dalam Surat Kabar Harian Republika”. Penelitian yang digunakan menggunakan analisis isi kuantitatif bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar tingkat objektivitas surat kabar harian Republika dalam memberitakan mengenai lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Hasil penelitian memberikan jawaban bahwa berita-berita terkait LGBT pada surat kabar harian Republika didominasi oleh penggunaan fakta psikologis. Sebanyak 57,14% fakta yang digunakan wartawan Republika adalah fakta psikologis, sedangkan 40% lainnya merupakan fakta kombinasi. Kemudian juga terdapat 2,86% yang sama sekali tidak mencantumkan fakta. Hal ini menunjukkan bahwa wartawan harian Republika cenderung menggunakan komentar narasumber sebagai sumber berita utamanya. Lalu, surat kabar harian Republika dalam memberitakan fenomena LGBT hanya mampu memenuhi prinsip relevansi, sedangkan prinsip keseimbangan (*balance*) dan netralitas belum terpenuhi. Pemberian porsi untuk menyampaikan pendapat dari narasumber juga tidak terpenuhi secara seimbang.

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

	<b>PENELITIAN I</b>	<b>PENELITIAN II</b>
<b>Nama Peneliti</b>	Shelly Nove Sary	Arga Raka Peterson
<b>Tahun Penelitian</b>	2016	2016
<b>Asal Penelitian/lembaga</b>	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Universitas Multimedia Nusantara
<b>Judul Penelitian</b>	Analisis Isi Objektivitas Pemberitaan Hukuman Mati Terpidana Narkotika Tahap I dan II Pada Program <i>Metro News</i> di Metro TV	Objektivitas Pemberitaan Terkait LGBT Dalam Surat Kabar Harian <i>Republika</i>
<b>Permasalahan Penelitian</b>	Bagaimana tingkat objektivitas pemberitaan hukuman mati terpidana narkotika tahap 1 dan 2 pada program <i>Metro News</i> di Metro TV	Seberapa besar tingkat objektivitas surat kabar harian <i>Republika</i> dalam memberitakan mengenai lesbian, <i>gay</i> , biseksual, dan transgender (LGBT)
<b>Tujuan Penelitian</b>	Untuk mengetahui objektivitas pemberitaan hukuman mati terpidana narkotika tahap 1 dan 2 pada program <i>Metro News</i> di Metro TV	Untuk mengukur seberapa besar tingkat objektivitas surat kabar harian <i>Republika</i> dalam memberitakan mengenai lesbian, <i>gay</i> , biseksual, dan transgender (LGBT)
<b>Teori yang digunakan</b>	Konsep Objektivitas Westerstahl	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teori Tanggung Jawab Sosial</li> <li>- Teori Media Massa</li> <li>- Teori Media Cetak</li> <li>- Konsep LGBT</li> </ul>

		- Konsep Objektivitas Westerstahl
<b>Metode Penelitian</b>	Analisis Isi Kuantitatif	Analisis Isi Kuantitatif
<b>Instrumen Penelitian</b>	Operasionalisasi Variabel Konsep Faktualitas dan Imparsialitas Westerstahl	Operasionalisasi Variabel Objektivitas J. Westerstahl
<b>Unit Analisis</b>	Objek penelitian yang dikaji berupa tayangan <i>Metro News</i> periode Januari - Mei	Objek penelitian yang dikaji berupa artikel berita terkait LGBT dalam surat kabar harian <i>Republika</i> periode Januari 2016 – Februari 2016
<b>Hasil Penelitian</b>	Metro News dalam penyajian beritanya terkait hukuman mati terpidana narkotika tahap 1 dan tahap 2 dinilai sudah objektif karena dari sembilan indikator yang diteliti, hanya satu indikator yang tidak memenuhi syarat objektivitas yaitu pada indikator keseimbangan berita (equal access), sedangkan delapan indikator lainnya memenuhi syarat objektivitas sebuah berita.	Hasil penelitian memberikan jawaban bahwa berita-berita terkait LGBT pada surat kabar harian <i>Republika</i> didominasi oleh penggunaan fakta psikologis. Sebanyak 57,14% fakta yang digunakan wartawan <i>Republika</i> adalah fakta psikologis, sedangkan 40% lainnya merupakan fakta kombinasi. Kemudian juga terdapat 2,86% yang sama sekali tidak mencantumkan fakta.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Tanggung Jawab Sosial

Social responsibility theory (teori tanggung jawab sosial) merupakan suatu teori yang bertujuan utama dalam hal kebebasan pers yang juga perlu diikuti dengan tanggung jawab sosial. Teori ini pertama kali ada di tahun 1947, di mana saat itu timbul rasa khawatir kepada media di Amerika Serikat yang notabene menggunakan sistem media libertarian. Setelah *The Hutchins Commission of Freedom Press* melakukan penelitian, maka muncullah hasil laporan kondisi media di Amerika Serikat yang kemudian menimbulkan rasa kekhawatiran tersebut. Menurut McQuail (2010, p. 170), pemberitaan sensasional, komersialisme, dan muatan politik adalah hal yang menjadi kritikan utama mengenai isi media oleh *The Hutchins*.

Lebih lanjut lagi, dari kondisi yang seperti itu lah para anggota di *The Hutchins Commission of Freedom Press* terbelah menjadi dua pemikiran. Di satu sisi yaitu bagian atau kelompok pemikir yang tetap menganut sistem libertarian, dan kelompok lainnya beranggapan yakin bahwa adanya beberapa aturan pers menjadi hal yang dibutuhkan (Baran & Davis, 2012, p. 114). Kelompok libertarian tidak menginginkan perubahan atau tambahan apapun. Mereka tetap menginginkan sistem kebebasan setuhnya kepada pers. Karena anggapan yang dimiliki oleh penganut libertarian adalah, jika adanya aturan yang kemudian diberlakukan dalam pers, maka pemerintahan akan mampu untuk mengarahkan dan menguasai isi media. Namun bagi kelompok yang menginginkan adanya aturan memiliki keyakinan bahwa tanpa adanya aturan maka media juga akan mudah ditunggangi

oleh kepentingan dari kelompok tertentu yang dominan di dalam masyarakat, membuat kelompok yang lemah harus terpinggirkan dan siap dijadikan ‘kambing hitam’. Pahitnya, tanpa aturan – aturan, bisa juga dijadikan sebagai alat propaganda untuk menyebar kebencian sekaligus meraup rasa simpati besar dari masyarakat untuk memperoleh kedudukan tinggi.

Perseteraan dua kelompok dalam *The Hutchins Commission* akhirnya mencari titik solusi dengan memberikan kepercayaan kepada praktisi media yang akan merumuskan satu konsep guna melayani kepentingan publik. Hasil akhir ini lah yang nantinya akan muncul sebagai sistem baru dengan nama *The Social Responsibility Theory of the Press*. Dalam bukunya, Baran dan Davis (2012, p. 115) menyatakan bahwa teori ini menekankan kepada media untuk memiliki kewajiban dalam hal independen, objektif, serta akurat dalam menyampaikan pemberitaan, serta yang paling penting adalah konten media harus bersifat mendidik dan membuat masyarakat untuk semakin maju.

Adapun untuk preposisi dari teori tersebut McQuail (2010, p. 171) menyebutkan bahwa:

- a. Media mempunyai kewajiban terhadap masyarakat, dan kepemilikan media adalah kepercayaan publik.
- b. Isi pemberitaan haruslah jujur, akurat, berimbang, objektif, dan relevan.
- c. Media perlu diwajibkan bebas, juga diwajibkan untuk mengatur dirinya sendiri.
- d. Kode etik yang sudah ada harus dipatuhi oleh tiap media dan melakukan perilaku profesional sebagaimana yang ada di dalam panduan.

e. Pemerintah berhak untuk ikut campur dalam hal menjaga kepentingan umum di saat – saat tertentu.

Agar teori tersebut bisa diaplikasikan secara sepenuhnya, maka ada diperlukan yang namanya prinsip dasar. McQuail dalam Baran & Davis (2012, p. 118) menjelaskan bahwa prinsip dasar dari social responsibility theory adalah:

a. Setiap media wajib tunduk serta mematuhi kewajiban mereka terhadap masyarakat.

b. Yang harus dipenuhi oleh media sebagai kewajiban utama yaitu dengan menetapkan standar tinggi atau profesionalitas yang berhubungan dengan informasi, kebenaran, akurasi, objektivitas, dan berimbang.

c. Dalam memenuhi kewajibannya, media juga perlu mengatur dirinya dalam dunia hukum kelembagaan yang mapan.

d. Media harus menghindari yang sekiranya dapat mengarahkan masyarakat kepada kegiatan kriminalitas, kekerasan, ketidak tertiban umum, dan atau penghinaan kepada kalangan minoritas.

e. Media secara umum harus bersifat plural serta mencerminkan keberagaman dan memberi kesempatan untuk mengeluarkan bermacam sudut pandang dan hak jawab.

f. Masyarakat bersama publik mempunyai hak untuk meminta standar yang tinggi dari media serta boleh melakukan intervensi jika sekiranya berguna untuk menjaga kepentingan umum.

g. Media profesional dan pewarta wajib memiliki keterbukaan, bertanggung jawab pada masyarakat, pada karyawan, dan juga pada pasar.

Baran & Davis (2012, p. 121) menjabarkan masih ada beberapa kelemahan dalam teori ini, antara lain:

- a. Terlalu optimis atas keinginan media dalam hal tanggung jawab.
- b. Terlalu optimis atas keinginan individu (jurnalis) dalam hal tanggung jawab.
- c. Menyisihkan dari yang namanya ‘mencari keuntungan’, dan persaingan antar media
- d. Melegitimasi status quo.

### **2.2.2 Objektivitas Berita**

Menurut Charnley dan Neal dalam Sumadiria (2006, p. 65) berita adalah laporan terstruktur mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan juga penting bagi sebagian besar khalayak pembaca, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online internet.

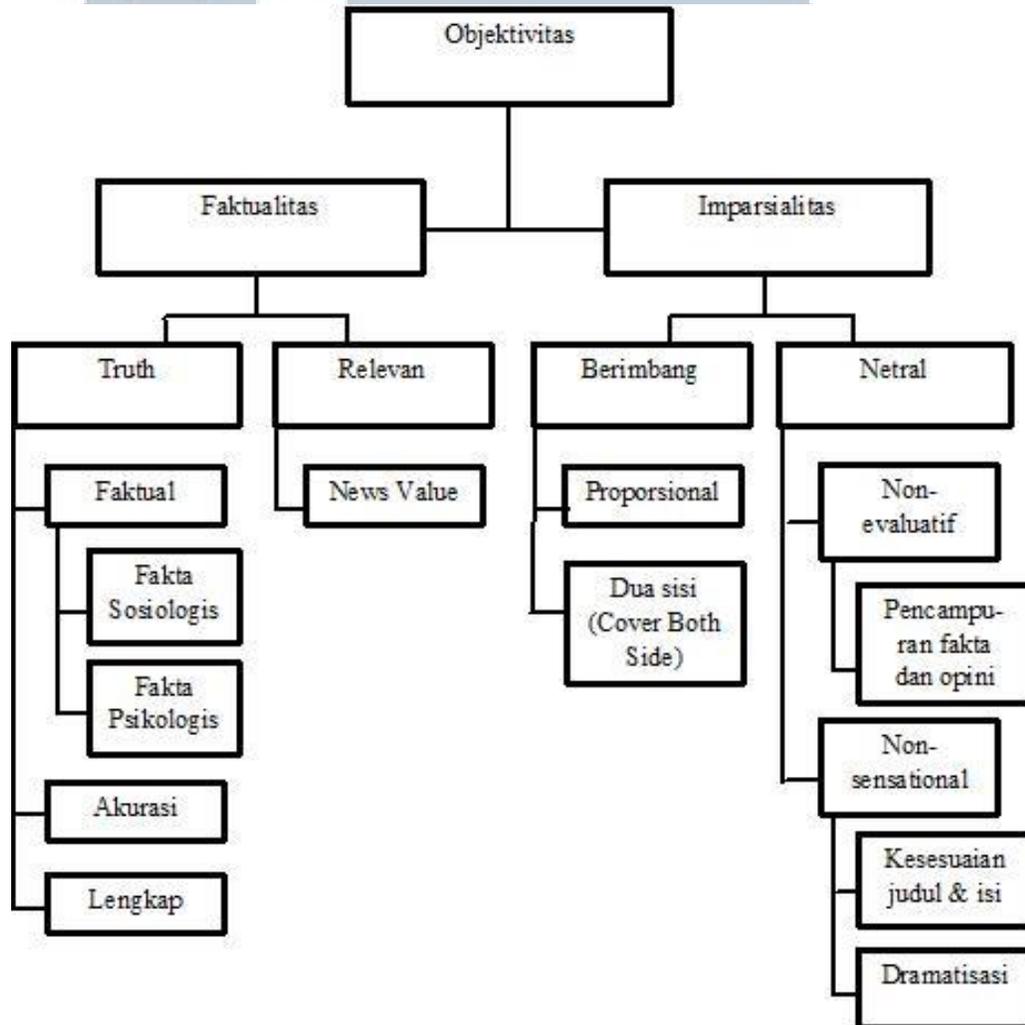
Seorang wartawan dalam praktik jurnalistiknya wajib memproduksi berita yang berisi informasi berkualitas. Syarat utama yang perlu dipenuhi media ataupun wartawan yakni menerapkan prinsip objektivitas dalam berbagai tahapan praktik jurnalistik. Tahapan tersebut meliputi tahap pengumpulan, pengolahan, sampai penyebaran informasi.

Objektivitas merupakan sebuah gagasan sederhana yang menuntut bahwa berita haruslah laporan yang dapat diandalkan dan jujur mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dunia (McQuail, 2011, p. 96). Dengan ini memperjelas bahwa berita baik media tradisional maupun media baru harus dapat dipercaya dan menarik perhatian pembaca, tanpa mengaburkan berita yang seharusnya disampaikan.

Seorang peneliti asal Swedia, J. Westerstahl (1983) dalam buku McQuail (2011, p. 98) mengemukakan sebuah rumusan utama konsep objektivitas untuk mengukur tingkat keseimbangan dan netralitas suatu pemberitaan. Westerstahl mengemukakan sebuah rumusan utama konsep objektivitas menjadi dua, yakni aspek kognitif (kualitas informasi/ faktualitas) dan aspek evaluatif (imparsialitas). Konsep Westerstahl terkait objektivitas berita dipaparkan lebih lanjut pada skema berikut ini.



Skema 2.1 Objektivitas Berita Westertahl



Sumber: (McQuail, 1992, h. 96)

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

Dimensi pertama dari objektivitas menurut Westerstahl adalah faktualitas. Faktualitas berkaitan erat dengan objektivitas seorang wartawan, bahwa berita memberitahukan masyarakat mengenai dunia nyata yang sebenarnya (McQuail, 2011, p. 96). Faktualitas kemudian diturunkan kedalam dua subdimensi, yaitu kebenaran dan relevansi.

Dalam subdimensi kebenaran, seorang wartawan harus membuat berita sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, tanpa ada maksud untuk mengaburkan beritanya. Untuk meneliti subdimensi kebenaran, ada beberapa aspek yang dapat diteliti yaitu, faktual, akurasi, dan lengkap. Faktual berarti menyajikan berita dengan menampilkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Lalu akurasi, dapat secara sederhana diartikan ketepatan data dan informasi yang dilakukan wartawan secara cermat (Ardianto, 2007, p. 208). Akurasi juga merupakan kesesuaian fakta dengan peristiwa yang sebenarnya. Lengkap jika berita diberikan keseluruhannya, baik fakta maupun peristiwa.

Kefaktualan atau *factualness* menurut McQuail (1992, p. 205), bisa dimengerti sebagai derajat kefaktualan berita. Derajat kefaktualan memiliki keterkaitan erat dengan tingkat korespondensi antara pemberitaan dengan kenyataan, atau antara suatu teks dengan realita yang sesungguhnya. Pada dasarnya, suatu berita wajib memiliki keterkaitan dengan realitas yang akan ditunjukkan oleh seorang wartawan. Semakin tinggi isi kerealistisan suatu berita maka semakin faktual pula berita tersebut. Untuk mengukur faktualitas berita maka yang pertama dilakukan adalah menentukan elemen tekstual dalam suatu teks menjadi unit – unit analisis yang masing – masing mengandung

sebuah pernyataan faktual (atau referensi) atau dengan cara menentukan sebuah *main point* dari suatu rangkaian “cerita” dalam berita.

Aspek faktual artinya menyuguhkan berita dengan dengan memaparkan fakta yang sebetulnya terjadi di lapangan. Berdasarkan pendapat Siregar (1998, p. 79), kategori fakta bisa dibagi dan dikelompokkan menjadi tiga hal. Yang pertama adalah fakta sosiologis yang di mana dapat disamakan dengan fakta peristiwa. Fakta dibuat berdasarkan hasil pengamatan wartawan secara langsung di lapangan. Fakta ini harus memiliki kelengkapan unsur 5W+1H (what, who, where, when, why, how). Unsur-unsur tersebut membantu wartawan untuk menulis berita secara akurat dan sesuai dengan kenyataan. Kedua adalah fakta psikologis, di mana berita dianggap mengandung fakta psikologis apabila mencantumkan pernyataan atau komentar narasumber terkait masalah yang hendak diberitakan oleh wartawan. Kemudian yang terakhir adalah fakta kombinasi, di mana berita dapat pula mengandung kombinasi fakta, yakni dengan menggabungkan fakta sosiologis dan fakta psikologis secara seimbang.

Jika elemen pertama dari kebenaran adalah faktualitas, maka elemen kedua dari subdimensi kebenaran adalah akurasi yang di mana juga terbagi ke dalam dua variabel, yaitu pencantuman waktu terjadinya peristiwa dan atribusi atau pencantuman kejelasan sumber berita. Aspek akurasi berhubungan dengan data serta informasi yang dilakukan wartawan secara cermat (Ardianto, 2007, p. 208). Guna mencapai aspek keakuratan, bermacam hal yang wajib dianalisis menyeliputi pencantuman waktu dari kejadian peristiwa dan atribusi.

Pencantuman waktu adalah hal yang sangat penting dalam menyuguhkan suatu berita supaya mudah dipahami pembaca akan peristiwa tersebut. Lalu, atribusi adalah pencantuman asal berita dengan jelas dengan maksud untuk pengkonfirmasi seperti nama, pekerjaan, serta berbagai macam hal yang sekiranya bisa dijadikan sebagai bahan konfirmasi.

Subdimensi kedua dari faktualitas adalah relevansi. Nordenstreng dalam McQuail (2012, p. 223) menjelaskan relevansi adalah suatu proses seleksi berita akan apa yang penting bagi penerima yang dituju maupun masyarakat dan dilaksanakan menurut prinsip yang jelas dan berhubungan. Suatu informasi dianggap relevan apabila hal tersebut berguna dan sesuai bagi kebutuhan khalayak. Dalam subdimensi relevansi ada beberapa gagasan dan kriteria yang bersaing mengenai apa yang dianggap relevan, yang pertama adalah sumber kriteria adalah apa yang dikatakan teori maka seperti itulah berita seharusnya; kedua adalah apa yang diputuskan jurnlis profesional sebagai hal yang paling relevan; dan yang ketiga adalah apa yang dianggap khalayak sebagai sesuatu yang menarik dan berguna (McQuail, 2011, p. 97). Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada gagasan yang ketiga yang tidak lain adalah nilai berita. Nordenstreng dalam McQuail (2012, p. 223) menjelaskan relevansi adalah suatu proses seleksi berita yang dilaksanakan menurut prinsip yang jelas dan berhubungan dengan apa yang penting bagi penerima yang dituju maupun masyarakat. Berita dianggap penting bagi penerima jika memiliki nilai berita.

Dimensi lainnya dari objektivitas yakni imparzialità. Imparzialità berkaitan dengan sikap netralitas dan keobjektifan wartawan. Dengan menggunakan sumber yang merepresentasikan pandangan setiap obyek pemberitaan dengan pembagian porsi yang sepadan (*cover both sides*) dapat membantu tingkat netralitas berita. Seorang wartawan perlu melihat suatu peristiwa dengan berbagai sudut pandang guna menghasilkan berita yang tidak berpihak. Selain itu, seorang wartawan juga dituntut untuk tidak berpihak khususnya saat ada dua atau lebih pandangan yang berbeda mengenai suatu fenomena yang ada (McQuail, 1992, p. 201).

Dimensi imparzialità terbagi atas dua subdimensi yakni berimbang dan netral. Subdimensi pertama yaitu keseimbangan. Menurut McQuail (1992, p. 201), keseimbangan merujuk pada pemilihan (seleksi) atau penghilangan fakta yang cenderung berat sebelah dalam menggambarkan nilai atau pandangan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Dalam subdimensi keberimbangan, aspek yang dapat diteliti kemudian diturunkan menjadi dua kriteria yaitu proporsional dalam segi ukuran kolom dan dua sisi (*cover both side*). Proporsional berarti memberikan penilaian yang berimbang bagi setiap aktor yang diberitakan, baik penilaian positif maupun negatif dalam kolom pemberitaan. Sedangkan dua sisi (*cover both sides*) adalah jika masing-masing pihak yang terlibat dalam pemberitaan diberikan porsi yang sama sebagai narasumber berita, serta diberi kesempatan untuk menuangkan pemikirannya secara bersamaan.

Subdimensi imparialitas berikutnya adalah netralitas, McQuail (2011 p. 98) mengatakan bahwa netralitas merupakan penyajian berita dengan tidak menggabungkan antara fakta dengan opini, dan menghindari penilaian atau bahasa dan gambar yang emosional. Dengan bersikap netral, seorang wartawan dapat menyajikan suatu berita seutuhnya tanpa memberikan opini yang memungkinkan terjadinya keberpihakan. Terkait penyajian berita yang netral, ada dua kriteria yang harus dipenuhi yaitu *non-evaluative* dan *non-sensational*.

Elemen yang pertama adalah *non-evaluative* di mana artinya seorang wartawan atau media tidak mengasih penilaian atau mengadakan suatu hal berdasarkan pendapat pribadi dalam menuliskan suatu berita (Eriyanto, 2011, p. 194). Berita yang disajikan juga tidak mencampurkan fakta dan opini wartawan (Kriyantono, 2012, p. 249).

Lalu elemen yang kedua adalah *non-sensational* yang terbagi menjadi dua variabel yaitu aspek pertama adalah kesesuaian antara judul dengan isi berita. Kesesuaian antara judul dengan isi berita menjadi satu kesatuan dalam kalimat yang sama dalam isi sekaligus kutipan yang tercantum jelas dalam berita. Dan aspek kedua adalah dramatisasi yang memiliki keterkaitan dengan melebihi – lebihkan dari fakta yang ada di lapangan dan memakai kalimat – kalimat hiperbola. Menggunakan dramatisasi dalam penulisan sebuah berita juga dapat membuat berita menjadi tidak objektif.

### 2.2.3 Media Cetak

Media cetak adalah media massa pertama yang hidup dan berkembang di masyarakat global selama lebih dari dari ribuan tahun. Dalam perjalanannya media cetak berperan penting dalam fungsinya sebagai pengawasan dan juga sebagai sumber informasi.

Dalam perspektif jurnalistik, setiap informasi yang disajikan kepada khalayak, bukan saja harus benar, jelas dan akurat, melainkan juga harus menarik, membangkitkan minat dan selera baca. Menurut Sumadiria (2006, p. 4) jurnalistik media cetak dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor verbal dan visual. Verbal, sangat menekankan pada kemampuan kita memilih dan menyusun kata dalam rangkaian kalimat dan paragraf yang efektif dan komunikatif. Sedangkan visual, menunjuk pada kemampuan kita dalam menata, menempatkan, mendesain tata letak atau hal – hal yang menyangkut segi perwajahan.

Dalam lingkupnya surat kabar dibagi kedalam beberapa tipe yakni, surat kabar harian nasional, harian kota besar metropolitan, harian pinggiran kota dan kota kecil, mingguan dan semi – mingguan, pers etnis, pers alternatif dan berlawanan, dan surat kabar bagi para pengguna kendaraan (J. Baran, 2012, p. 142).

### 2.2.4 Asian Games

Asian Games, atau juga dengan nama lain Asiad, merupakan kegiatan olahraga yang diadakan per empat tahun sekali, dan diikuti oleh bermacam

cabang serta atlet dari seluruh Asia (Worden, 2011, p. 50). Pertandingan tersebut pada awalnya diatur oleh *Asian Games Federation* (AGF), serta pertama kali diadakan di New Delhi, India hingga pada tahun 1978. Namun, pada tahun yang sama, AGF resmi dibubarkan dan digantikan oleh Dewan Olimpiade Asia atau Olympic Council of Asia (OCA) tepat pada tahun 1982. Ajang perlombaan tersebut diakui oleh Komite Olimpiade Internasional dan dinyatakan sebagai ajang multi event terbesar kedua setelah Olimpiade Dunia (“Sejarah OCA”, 2010, para. 4).

Dalam sejarahnya, sudah ada sembilan negara yang telah menjadi tuan rumah Asian Games, dan hingga Asian Games 2014 di Korea Selatan pun sudah diikuti dengan total 46 negara di benua Asia, termasuk negara Israel yang dulunya sempat berhenti dari rangkaian kegiatan pada tahun 1974. Untuk selanjutnya, Asian Games ke- 18 akan diadakan di Indonesia dengan berlokasikan dua tempat yaitu di kota Jakarta dan kota Palembang dari 18 Agustus - 2 September 2018 (Persiapan Venue Asian Games, 2010, para. 2)

Seperti dikutip dari sumber aslinya, Tahun 1962 tercatat sebagai Asian Games pertama bagi Indonesia sebagai kota tuan rumah. Ajang yang berlangsung 24 Agustus-4 September itu dibuka secara resmi oleh Presiden Soekarno di Stadion Gelora Bung Karno. Diikuti 1.460 atlet yang mewakili 17 NOC Asia, multi event ini menampilkan 13 cabang olahraga; atletik, akuatik (renang, loncat indah, dan polo air), bola basket, tinju, balap sepeda (jalan raya dan trek), hoki, sepak bola, menembak, tenis meja, tenis, bola voli, dan gulat.

Asian Games 1962 ini menyediakan 372 medali emas (“Sejarah Asian Games”, 2018).

Namun masih di tahun yang sama ketika Indonesia menjadi tuan rumah, ada hal menarik yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menolaknya negara Israel untuk ikut berpartisipasi dalam pertandingan Asian Games ke- 6. Menurut laporan *JUARA.net*, “Ketika Israel Menjadi Negara yang Diusir dari Pentas Asian Games Atas Dasar Solidaritas” (2018, para. 1) saat itu yang menjadi alasan utama adalah gencarnya negara Indonesia dalam memberikan dukungan kepada negara Palestina untuk segera merdeka. Penolakan ini menjadi langkah awal di mana Israel menjadi negara minoritas serta dikucilkan dari ajang olahraga multi event tersebut. Namun negara Israel masih tetap ikut serta dalam Asian Games tahun 1966 dan 1970 yang saat itu negara Thailand menjadi tuan rumahnya. Namun tepat pada tahun 1974 ketika negara Iran menjadi tuan rumah, Israel mulai merasakan persekusi walaupun hanya sebatas semi-boikot, namun para atlet tetap diperbolehkan mengikuti perhelatan.

Asian Games ke- 18 merupakan kegiatan olahraga multi event di wilayah Asia yang akan diselenggarakan pada 18 Agustus – 2 September 2018, dan terbagi di dua kota salah satunya Jakarta dan Palembang. Dan juga terdiri dari dua tuan rumah pendukung yang berlokasi di provinsi Jawa Barat serta Banten (Utami, 2015, para. 2). Total cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak 40 cabang yang terbagi dari 32 cabang olahraga olimpiade dan 8 cabang olahraga yang bukan olimpiade. Tahun ini menjadikan kali kedua bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah di mana sebelumnya terakhir kali menjadi

tuan rumah pada tahun 1962. Namun beberapa fasilitas yang terakhir di gunakan pada Asian Games ke – 6 akan digunakan lagi pada rangkaian kegiatan olahraga Asian Games ke – 18 nanti. Dan ini juga akan menjadi kali pertama bahwa ajang olahraga multi cabang ini akan diadakan di dua lokasi sekaligus (Yashinta, 2015, para. 7).

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Sesuai dengan teori tanggung jawab sosial, dalam memberitakan suatu kasus, media massa haruslah melakukan pemberitaan yang layak dan berkualitas sekaligus informatif bagi publik. Objektivitas dibutuhkan untuk melaksanakan hal tersebut.

Hal ini pula yang harus dilakukan dalam melakukan pemberitaan mengenai persiapan lomba olahraga Asian Games 2018. Menjaga objektivitas merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh pers. Itulah sebabnya, dalam memberitakan informasi kepada publik, media massa tidak boleh mengesampingkan objektivitasnya. Dalam menyajikan hal ini, unsur objektivitas seperti faktualitas, dan keberimbangan berita harus diutamakan dan menjadi unsur utama dalam memberitakan berita.

Oleh karena itu, objektivitas pemberitaan olahraga Asian Games 2018 di surat kabar HARIAN NASIONAL dapat diketahui dengan menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Dengan menggunakan metode ini, penelitian akan berjalan secara sistematis, objektif, dan kuantitatif sehingga hasil yang akan didapat menjadi tepat dan akurat.

Skema 2.2 Kerangka Pemikiran

